

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Z. A. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Chomsyah, S. (2017). Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Toko Dalam Bentuk Tidak Tertulis. *Jurnal Advokasi*.
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. PT Leutika Nouvalitera.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2018). *Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2018 tentang Tata Cara Permohonan Dan Dokumen Persyaratan Lelang Dengan Objek Lelang Hak Menikmati Barang*.
- HS, S. (2017). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (10 ed.). Raja Grafindo Perkas.
- Krishna, V. (2009). *Auction Theory* (2nd ed.). Elsevier Inc.
- Kementerian Dalam Negeri (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Kementerian Keuangan. (2006). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)*.
- Kementerian Keuangan. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan*.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan*

Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.*

Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Keuangan.*

McCarthy, E. J. (1960). *Basic Marketing: A Managerial Approach*. R.D. Irwin.

Ngwira, M., & Manase, D. (2016). *Public Sector Property Asset Management*. Wiley-Blackwell.

Presiden Republik Indonesia. (2004). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional.*

Presiden Republik Indonesia. (2004) *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset.*

Presiden Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tetntang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Presiden Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.*

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

RICS. (2008). *RICS Public Sector Asset Management Guidelines: A guide to best*

practice. Royal Institution of Chartered Surveyors.

Salim H.S. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (14 ed.). Sinar Grafika.

Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78–92.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.

Theodora, G. (2021). *Keabsahan Obyek Lelang Berupa Hak Menikmati Barang*.

Usman, R. (2016). *Hukum lelang* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.

Wijaya, T. N., & Hamidah, H. (2018). Institusionalisasi Paradigma Revenue Center Untuk Pengelolaan Aset Negara Yang Optimal (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surabaya). *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(2), 173–190.